

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA WUKIRSARI DI KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF WUKIRSARI TOURISM VILLAGE, IN IMOGIRI DISTRICT, BANTUL REGENCY

Oleh : Fajrina Risanti dan Fransisca Winarni, M.Si., Fakultas Ilmu Sosial UNY,
fajrinarisanti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *collaborative governance* yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul serta faktor penghambatnya. Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan kolaborasi *stakeholder* dapat mencerminkan kesiapan dalam menangani permasalahan di masyarakat. Penelitian menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Wukirsari dengan teori menurut DeSeve. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dipilih untuk pemeriksaan keabsahan data. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator *collaborative governance* menurut DeSeve yang tidak tercapai: belum ada aturan resmi yang mengikat kolaborasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta fasilitas sarana prasarana, dan kurangnya kepercayaan antar *stakeholder*. Faktor yang menjadi penghambat dalam kolaborasi meliputi faktor budaya, institusi dan politik.

Kata kunci: *Collaborative Governance, Stakeholder, pengembangan desa wisata*

ABSTRACT

This research aimed to describe the *collaborative governance* undertaken by the government, private and society in the development of tourist villages in Wukirsari Village Imogiri District Bantul regency and its inhibiting factors. This research is important because the success of stakeholder collaboration can reflect the readiness in handling the problems in the community. The research used descriptive design with qualitative approach. The research was conducted in Wukirsari Village with the theory according to DeSeve. The techniques of collecting data used were interviews, observation and documentation. Triangulation of sources was selected for validity checking of data. The data analysis techniques used Miles and Huberman's interactive models. The results showed that *collaborative governance* in the development of tourist village in Wukirsari Village Imogiri District Bantul Regency has not run optimally. This can be seen from some unadjusted *collaborative governance* indicators by DeSeve: there are no formal rules that bind collaboration, limited human and budgetary resources and infrastructure facilities, and lack of trust among stakeholders. Factors that hamper collaboration are including cultural, institutional and political factors.

Keywords: *Collaborative Governance, Stakeholder, village tourism development*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan atraksi wisata yang mempunyai banyak komponen penunjang seperti jasa dan fasilitas perjalanan meliputi fasilitas hotel, restoran, tempat oleh-oleh dan lain-lain sehingga berpengaruh terhadap berbagai bidang lain, seperti pertanian, industri, jasa pelayanan dan transportasi. Pariwisata dapat membuka lapangan kerja baru, menambah kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan, menumbuhkan industri-industri baru yang menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat setempat sehingga perekonomian nasional dapat stabil.

Desa wisata menjadi program yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Pengembangan desa wisata ini dilatarbelakangi oleh sektor pariwisata perdesaan yang saat ini mendapat perhatian khusus serta menarik minat wisatawan. Jumlah Wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara dari tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan peningkatan seperti yang terangkum dalam tabel berikut.

Tabel Kunjungan Wisatawan ke Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan	
		Wisman	Wisnus
1	2011	360	50.351
2	2012	63	139.915
3	2013	5	145.501
4	2014	6.436	1.326.998
5	2015	5.618	1.588.184

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016

Desa Wukirsari adalah salah satu desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi desa wisata sejak tahun 2010. Desa Wisata Wukirsari memiliki potensi wisata yang beragam seperti makam raja-raja, kerajinan turun temurun seperti sentra kerajinan wayang kulit (tatah sungging), sentra batik tulis, sentra kerajinan bambu, pembuatan genteng, pengobatan guruh, wisata kuliner seperti pecel kembang turi dan wedang uwuh, wisata alam seperti air terjun dan saat ini mulai dikembangkan penangkaran burung yang kemudian juga dibangun istana burung.

Dalam pengembangan desa wisata Wukirsari masih terdapat kendala yaitu infrastruktur yang belum memadai, fasilitas desa wisata seperti masih berkurangnya lahan parkir untuk bus-bus yang berkunjung, dan kesulitan dana

dialami oleh masyarakat untuk mengembangkan infrastruktur dan melakukan pembangunan desa wisata seperti sarana prasarana. Kemudian kendala dari aspek lingkungan adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan lingkungan.

Dalam pengembangan desa wisata Wukirsari *collaborative governance* terlihat dari adanya kolaborasi antar aktor yaitu pemerintah (pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata maupun pemerintah desa), masyarakat (pengrajin, pokdarwis, pengelola desa wisata, karangtaruna dan paguyuban-paguyuban) serta pihak swasta yang sebagai mitra. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku wisata. Sedangkan swasta sebagai mitra untuk membantu dalam mengatasi masalah dan kendala pengembangan desa wisata serta sebagai motivator yang menggerakkan masyarakat melalui pembinaan. Terdapat mitra yang membina Desa Wisata Wukirsari melalui berbagai bantuan serta pelatihan untuk pengelola Desa Wisata Wukirsari. Namun *Collaborative Governance* yang ada terkendala oleh pemahaman akan sadar wisata yang masih kurang oleh masyarakat, kurangnya sarana prasarana untuk mengembangkan desa wisata, terdapat kurangnya kepercayaan antar pihak-pihak yang bekerjasama serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia maka dibutuhkan peran aktif dari

masing-masing *stakeholder* untuk mengembangkan desa wisata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata. Dengan adanya keterbatasan masing-masing aktor maka diperlukan usaha kolaborasi dengan peran masing-masing *stakeholder* yang berada di dalamnya untuk mewujudkan tujuan dan mengatasi permasalahan pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari.

Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* dari DeSeve dalam Sudarmo (2011:110-116) yang meliputi indikator tipe *networked structure, Commitment to a common purpose, Trust among the participants, Access to authority, Distributive accountability / responsibility, Information sharing, Access to resources* dan *Governance*.

Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul”.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena desain penelitian ini

memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci dan mendalam mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Wisata Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 28 Februari 2018.

Subjek Penelitian

1. Bapak Antoni Hutagaol, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
2. Bapak Alexander Joko Wintolo, Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
3. Bapak Bayu Bintoro, Kepala Desa Wukirsari
4. Bapak Agus Basuki Tapip, KAUR Umum Desa Wukirsari
5. Bapak Isnaini Muhtarom, Ketua Pengelola Desa Wisata Wukirsari
6. Bapak Nur Ahmadi, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wukirsari

Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2014: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer melalui wawancara dan observasi dan sumber data sekunder berupa dokumen buku, jurnal, publikasi berita, foto, catatan, peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama didalam penelitian ini adalah peneliti dengan mengembangkan pedoman wawancara dan observasi dengan bantuan peralatan pengumpulan data seperti kamera, alat tulis, dan perekam suara.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur untuk menggali data primer dari informan penelitian.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pengembangan desa wisata, pemberitaan dari surat kabar, peraturan-peraturan yang ada, dokumen resmi berupa Surat Keputusan Forkom Pokdarwis dan SK Desa Wisata, Laporan kegiatan desa wisata, profil desa wukirsari, RPJM Desa Wukirsari Tahun 2017, Dokumen Pengelola Desa

Wisata, Dokumen Pokdarwis, profil Dinas Pariwisata, Data kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun selain itu peneliti melakukan penelusuran data online dengan pencarian data melalui fasilitas internet.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang berarti teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul

1. Network Structure (Struktur Jaringan)

Kolaborasi dalam pengembangan desa wisata menurut *networked structure* tidak adanya hierarki. Kolaborasi yang dijalankan hanya sebatas kesepakatan saja belum ada suatu hal yang mengikat ataupun struktur organisasi bersama, struktur organisasi hanya pada instansi masing-

masing. Pelaksanaan kolaborasi yang berjalan dalam pengembangan desa wisata adalah Dinas Pariwisata, pemerintah desa, pokdarwis, pengelola, masyarakat dan swasta seperti Bank BCA, Pertamina, Bank BNI, IRE, Jogja Heritage dan Perguruan Tinggi. Keterlibatan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan keterlibatan swasta hanya dengan jangka waktu awal-awal saja. Seharusnya kolaborasi dengan swasta bisa lebih optimal dengan berkesinambungan melakukan kolaborasi. Akan tetapi yang terjadi kolaborasi hanya bersifat bantuan infrastruktur saja. Bentuk struktur jaringan dalam kolaborasi pengembangan desa wisata yaitu *Network Administrative Organization* yaitu untuk mengelola jaringan itu sendiri, di dalam jaringan ini *stakeholders* yang terlibat tidak terlalu banyak, tidak sering melakukan pertemuan, tidak ada struktur yang mengikat dan tidak ada yang mendominasi sehingga perpaduan dari jaringan *self organization* dan *lead organization*.

2. Commitment to a common purpose (Komitmen Terhadap Tujuan)

Merupakan elemen yang mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan harus ada yakni karena perhatian dan komitmen untuk

mencapai tujuan. Tujuan ini biasanya terartikulasikan di dalam misi umum suatu organisasi pemerintah (DeSeve, 2007 dalam Sudarmo 2011:113). Kolaborasi yang mengacu pada alasan bahwa pemerintah, masyarakat dan semua pihak bertanggung jawab dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari. Kolaborasi yang dijalankan memiliki tujuan sama yang dijelaskan dalam visi misi setiap instansi. Realita yang terjadi memang pemerintah telah menjalankan visi begitupun dengan aktor lain. Walaupun mempunyai tujuan yang sama sehingga membentuk kolaborasi tetapi Komitmen antar aktor belum bisa dikatakan maksimal karena tidak secara terus menerus kegiatan yang disepakati dijalankan.

3. *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara para aktor).

Didasarkan pada hubungan profesional atau sosial; keyakinan bahwa para aktor mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha aktor lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka bisa “percaya” terhadap *partner-partner* (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah

pemerintah (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, misalnya) dan *partner-partner* di luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah disetujui bersama (DeSeve, 2007 dalam Sudarmo 2011:11).

Kolaborasi dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari membutuhkan suatu kepercayaan harus terjalin antara aktor yaitu dinas pariwisata, pemerintah desa, pokdarwis dan pengelola serta swasta dan masyarakat. Kolaborasi yang dijalankan sudah adanya kepercayaan antara keseluruhan aktor yang terlibat. Setiap aktor lebih berfokus kepada kepentingan bersama dalam pengembangan desa wisata Wukirsari. Dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar aktor sudah saling percaya satu sama lain. Setiap aktor cenderung berfikir *bersama* karena mau mendengar dari aktor lain. *Stakeholders* yang terlibat harus ada rasa saling percaya, jika mereka saling curiga, memfitnah bukti bahwa kolaborasi sudah tidak sehat (Sudarmo, 113: 2011). Dalam hal ini kolaborasi yang terjadi antar aktor dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari sudah terdapat kepercayaan antar aktor.

4. *Governance*

Governance meliputi; ada batas-batas siapa yang boleh terlibat dan siapa yang belum terlibat, aturan main yang jelas yang disepakati bersama, kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dilakukan. *Governance* dalam hal ini merupakan bagian dari indikator ukuran keberhasilan suatu *collaborative governance*. Bukan dimaksudkan dalam *governance* yang meliputi interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat tetapi lebih dalam bagian dari *collaborative governance* itu sendiri.

Kolaborasi dalam pengembangan desa Wisata Wukirsari tidak terlalu dijelaskan bagaimana keanggotaan yang terjalin dan bagaimana aturan yang mengikat secara hukum. Berjalannya kolaborasi hanya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing instansi dalam mewujudkan visi-misinya. Dinas Pariwisata memberi bantuan sarana prasarana, pelatihan dan pembinaan, pokdarwis dan pengelola desa wisata memberi kontribusi secara non-profit dikarekan sukarela untuk mengembangkan desa wisata, masyarakat terutama pengrajin ikut berkontribusi menjadi pemandu wisata dan melatih batik. Peran Swasta terlihat dari adanya bantuan terhadap infrastruktur, adanya

pendampingan serta pelatihan untuk mengembangkan desa wisata di Desa Wukirsari.

Menurut DeSeve (2007) dalam Sudarmo dikatakan bahwa *governance* harus mempunyai batas, aturan yang mengatur sanksi dalam berjalannya suatu kolaborasi. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak jelas bagaimana aturan tersebut dibuat karena belum adanya *Momeration Of Understanding (MoU)* tetapi *stakeholders* hanya menempatkan diri sesuai dengan wewenang dari masing-masing instansi. Setiap aktor diberikan kebebasan untuk membantu mengembangkan desa wisata Wukirsari dengan visi masing-masing. Belum adanya kesepakatan dari kolaborasi ini, dan tidak adanya pengawasan untuk melihat berjalannya kolaborasi ini ataupun sanksi jika melanggar kesepakatan.

5. *Access to authority* (akses terhadap otoritas) yakni tersedianya ukuran-ukuran ketentuan prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Dinas Pariwisata memiliki ukuran ukuran dalam pengembangan desa wisata sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata. Dinas pariwisata memiliki

otoritas dalam pembuatan regulasi, serta sebagai aktor yang melakukan pembinaan terhadap desa wisata. Pokdarwis dan pengelola memiliki otoritas menyadarkan masyarakat terhadap sadar wisata dan melakukan pengelolaan desa wisata. Sedangkan pihak swasta memiliki otoritas atau kewenangan memberi bantuan baik dalam bentuk dana, sarana prasarana pelatihan ataupun melakukan pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa setiap *stakeholders* memiliki otoritas dari masing-masing *stakeholders* dan keterlibatan swasta sudah ada sehingga *stakeholders* bisa menjalankan peran sesuai dengan otoritas masing-masing.

6. *Distributive accountability atau responsibility* (Pembagian Akuntabilitas dan Responibilitas)

Terkait penataan, pengelolaan, manajemen bersama-sama dengan *stakeholders* lainnya, dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan, berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kolaborasi pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari pemerintah sudah menentukan peran dari masing-masing *stakeholders* sesuai dengan bidang masing-masing. Pembagian akuntabilitas dan kewenangan dari

masing-masing *stakeholders* dalam kolaborasi pengembangan desa wisata sudah sesuai dengan tanggung jawab masing masing. Untuk melakukan forum komunikasi diadakannya pertemuan satu bulan sekali . Pertemuan tersebut membahas kolaborasi yang sudah berjalan serta kendala yang dihadapi dalamoleh desa wisata. Suatu forum harus dapat dimanfaatkan oleh setiap aktor sebagai wadah berdiskusi dan bertatap muka, dan forum sudah diikuti oleh semua berpartisipasi. Walaupun sudah ada forkom namun pembagian akuntabilitas dari masing-masing aktor hanya sesuai dengan tanggungjawab masing-maisng intansi tidak secara bersama membagi tanggungjawab. Dikatakan kurang dalam pemgaian akuntabilitas juga disebabkan karena salah satu *stakeholders* kurang berpartisipasi.

7. *Information sharing* (penyampaian informasi)

Elemen yang kaitannya dengan kemudahan akses berupa sistem, *software*, dan prosedur yang mudah bagi para anggota, perlindungan *privacy*. Kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari sudah memiliki kemudahan akses informasi. Sudah ada forum komunikasi yang

melibatkan semua aktor, terdapat musyawarah tingkat dusun dan desa untuk membahas hal yang diperlukan untuk mengatasi kendala pengembangan desa wisata, adanya tinjauan dari tim Swasta untuk mengetahui kondisi desa swasta dan sudah optimalnya komunikasi melalui Media Sosial.

Selain komunikasi antar aktor di dalam kolaborasi itu sendiri, terdapat paguyuban sentra batik wayang maupun penangkaran burung yang masing-masing saling bekerjasama dan berkoordinasi. Selain itu terdapat pembinaan dan pelatihan rutin, oleh Dinas Pariwisata melalui forkom untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang ada. Kesimpulan yang didapat berdasarkan pemaparan tersebut *information sharing* dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari sudah dilakukan antar aktor. Kegiatan pertemuan, pelatihan dan *pembinaan* untuk saat ini masih dijalankan.

8. *Access to resources* (akses terhadap sumberdaya)

Ketersediaan sumber daya keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan *network*. Suatu program ataupun kegiatan dapat

berjalan ketika di didukung oleh sumberdaya yaitu terutama ketersediaan keuangan dan manusia. Sumber daya untuk mengembangkan desa wisata masih terlihat kurang dikarenakan masyarakat masih kurang memahami akan adanya sadar wisata dan sapta pesona, selain itu masih kurangnya kesadaran akan kebersihan. Sumber Daya Manusia juga masih terbatas pada pokdarwis dan pengelola dikarenakan masyarakat yang aktif hanya sedikit orang. Sumber daya dari aspek anggaran juga masih kurang terlihat dari pengembangan infrastruktur yang masih mengalami keterbatasan dana, sehingga memerlukan bantuan dana dari pihak pemerintah maupun swasta. Menurut Sunaryo dalam penelitian Sugi Rahayu, dkk mengatakan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta. tetapi dalam kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua *stakeholder* lainnya. Penyebabnya adalah lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumberdaya (*resource*) pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka di dalam

proses pengambilan keputusan. Dalam pengembangan desa wisata Wukirsari Sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat memang masih terbatas terkait sumberdaya manusia, anggaran maupun fasilitas dan sarana prasarana.

Faktor Penghambat Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul

Terdapat faktor penghambat yaitu Faktor Budaya karena masyarakat yang masih menganggap wisata adalah hal yang negatif dan homestay ditakutkan akan membawa dampak buruk ketika wisatawan menginap. Seharusnya diperlukan sosialisasi terkait sadar wisata. Hal ini merupakan tugas dari pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Dan Dinas Wisata juga untuk mengkaji ulang program penyadaran kepada masyarakat di Desa Wukirsari. Faktor institusi juga menjadi penghambat dikarenakan kurangnya sumber daya manusia maka diperlukan penyadaran kembali tentang sapta pesona. Masih terdapat ketergantungan pihak desa wisata dengan Pemerintah dan bantuan Swasta menjadikan desa wisata kesulitan berkembang. Faktor politik juga menjadi penghambat

dikarenakan kurangnya inovasi dari pemimpin dikarenakan belum ada regenerasi. Maka diperlukan regenerasi dan penyadaran masyarakat agar lebih kreatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Collaborative Governance dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa, Pokdarwis, Pengelola desa wisata, masyarakat dan Swasta (LSM, Bank serta Perguruan Tinggi) belum optimal. Hal ini berdasarkan analisis terhadap delapan faktor pengukur keberhasilan kolaborasi menurut DeSeve (2007) yang tidak tercapai yaitu belum ada aturan resmi yang mengikat kolaborasi yang dijalankan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta fasilitas sarana prasarana desa wisata dan kurangnya kepercayaan antar stakeholder dalam pengembangan desa wisata. Faktor penghambat berasal dari faktor budaya terkait kesadaran masyarakat yang menganggap wisata adalah hal yang negatif, faktor institusi terkait ketergantungan desa wisata terhadap Dinas Pariwisata maupun swasta sehingga terkesan mendominasi. Kemudian faktor politik, tidak adanya regenerasi pengelola dan pokdarwis desa wisata mengakibatkan kekurangan sumber daya manusia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari, masih ada beberapa permasalahan yang membutuhkan perbaikan kedepannya, maka dapat dijadikan saran:

1. Peningkatan sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona kepada seluruh masyarakat di Desa Wisata baik oleh pokdarwis maupun Dinas Pariwisata.
2. Pemerintah desa menetapkan anggaran khusus untuk mengoptimalkan pengembangan desa wisata.
3. Pengelola desa wisata melakukan regenerasi susunan pengurus untuk pembaharuan sumber daya manusia
4. Perlunya Peraturan baik peraturan daerah maupun peraturan desa tentang pengembangan desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris; Gash, Alison. (2007). *Journal of Public Administration Research & Theory, Collaborative Governance in Theory and Practice*. Vol. 18 Issue 4, p543- 571. 29p.
- Dwiyanto, Agus. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Spillane, James J. (1991). *Ekonomi Pariwisata Sejarah Dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subarsono, Agustinus. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu- Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.
- Sugi Rahayu, dkk. *Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 21, No. 1, April 2016.
- Kunjungan Wisatawan ke Desa Wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2017



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Alamat: Karangmalang Yogyakarta 552281 Telp.586168, Psw :247,248, 249

**Formulir Penulisan dan Pengunggahan Artikel *E-Journal* Mahasiswa
Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

Nama Mahasiswa	Fajrina Risanti
NIM	14417144010
Judul Tugas Akhir Skripsi	COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA WUKIRSARI DI KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
Nama Dosen Pembimbing	Fransisca Winarni, M.Si.
Nama Dosen <i>Reviewer</i>	Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si.
Tanggal Ujian Skripsi	9 April 2018

Yogyakarta,.....2018

Menyetujui,

Dosen *Reviewer*

(Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si.)
NIP. 19540807 197803 2 002

Dosen Pembimbing

(Fransisca Winarni, M.Si.)
NIP. 19590119 198702 2 002

Pengelola *E-Journal*
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

(Pandhu Yuanjaya, MPA.)
NIP. 11510900713614